



DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA

Abdurrahman Firdaus Thaha
 Universitas Hasanuddin
 firdaus.thaha@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa dampak yang ditimbulkan oleh virus corona terhadap perkembangan bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Metode analisis yang pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian (lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain (1) Jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%) (2) Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%) (3) Kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%) (4) Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%) (5) Kontribusi terhadap Investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%).

Kata kunci : COVID-19, dampak COVID-19, usaha mikro kecil dan menengah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze what kind of impact caused by the corona virus on the development of MSME businesses in Indonesia. The method of analysis in this research is a qualitative descriptive method.

Small and medium-sized businesses (UMKM) are at the forefront of economic shocks caused by the COVID-19 pandemic. Lockdown measures have abruptly stopped economic activity, with demand falling and disrupting supply chains around the world. In the initial survey, more than 50% of UMKM indicated that they could close down within the next few months. The impact of the COVID-19 pandemic on the UMKM sector is certainly very influential on Indonesia's economic conditions where the contribution of UMKM to the Indonesian economy is very large in various fields including (1) The number of business units in Indonesia per 2018 totaling 64.2 million business units, with the number of units UMKM businesses amounting to 64.1 Million (99.9%) (2) Contribution to the number of Workers, the total number of workers in Indonesia per 2018 totaling 120.6 Million people, with the number of workers in UMKM totaling 116.9 Million (97%) (3) Contribution to GDP, Total contribution of business world GDP in Indonesia per 2018 totaling 14,038,598 billion, with UMKM contribution to GDP of 8,573,895 billion (61.07%) (4) Contribution to Non-Oil and Gas Exports Total non-oil exports Indonesian oil and gas per 2018 total 2,044,490 billion, with the contribution of UMKM to non-oil and gas exports amounting to 293,840 billion (14.37%) (5) Contributions to Investment, Total investment in Indonesia per 2018 totaling 4,244,685 billion, with the contribution of UMKM reached Get an investment of 2,564,549 billion (60.42%)

Keywords: COVID-19, the impact of COVID-19, a small and medium sized micro business.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peningkatan negara yang terdampak virus Covid-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol dan Italia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk.

Beberapa lembaga bahkan memprediksikan perlemahan ekonomi dunia, antara lain International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian negara-negara di dunia juga sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020 ini pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif: Singapura -2,2, Hongkong -8,9, Uni Eropa -2,7 dan China mengalami penurunan sampai minus 6,8. Beberapa negara masih tumbuh positif namun menurun bila dibanding dengan kuartal sebelumnya. Amerika Serikat turun dari 2,3 menjadi 0,3, Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3 dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8. Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi hanya 2,97 pada kuartal pertama ini. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020, dimana pada kuartal 1 (Q1) 2020 hanya mencapai 2,97 persen. Nilai itu mendarat jauh dari target kuartal I yang diharapkan mencapai kisaran 4,5-4,6 persen. Berdasarkan pertumbuhan year-on-year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53 persen. Hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada Triwulan I-2020 juga turun drastis hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9 persen bila dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Jumlah penumpang angkutan rel

dan udara juga tumbuh negatif seiring dengan diberlakukannya PSBB.

Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian (lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Sejak itu, kebangkrutan telah menumpuk dan tingkat awal mulai runtuh. Misalnya, pada bulan Maret, aplikasi bisnis AS turun antara 40% hingga 75% dibandingkan tahun sebelumnya - kontraksi bahkan lebih tajam dibandingkan selama Great Recession. UMKM menyediakan setiap dua dari tiga pekerjaan di wilayah OECD dan berkontribusi setengah dari PDB. Angka-angka ini menunjukkan potensi pengorbanan segmen besar ekonomi. Memang, data OECD menunjukkan bahwa UMKM terwakili secara berlebihan di sektor-sektor yang paling terkena dampak tindakan penguncian, yaitu pariwisata, layanan ritel dan profesional, dan konstruksi dan transportasi, di mana mereka menyumbang tiga perempat dari semua pekerjaan. Wabah ini telah mengungkapkan kerentanan tinggi dari banyak usaha kecil itu, yang kondisinya semakin lama semakin lama situasi saat ini berlangsung.

Dampak pandemic COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain (1) Jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%) (2) Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%) (3) Kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%) (4) Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap

ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%) (5) Kontribusi terhadap Investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%).

Salah satu dampak pandemic COVID-19 yang telah menhangtam UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Sementara itu, sektor UMKM yang terganggu selama pandemi Covid-19, selain makanan dan minuman, adalah industri kreatif dan pertanian.

Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUMKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan, mengkaji dan mendeskripsikan semua gejala-gejala yang terjadi akibat covid-19 dan efeknya terhadap bisnis UMKM yang ada di Indonesia.

Waktu penelitian berlangsung sekitar empat bulan yaitu antara bulan Maret hingga Juni tahun 2020.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan bisnis akibat pandemi COVID-19 ini diperlukan berbagai jenis pendekatan, diantaranya adalah pendekatan secara makro melalui kebijakan pemerintah maupun

pendekatan secara mikro melalui manajemen UMKM secara bisnis.

Secara pendekatan makro melalui kebijakan pemerintah, Laporan OECD3 menyebutkan bahwa untuk membantu UMKM saat ini dan membuka jalan bagi pemulihan yang tangguh, pemerintah harus mempertimbangkan setidaknya tiga tindakan penting, yaitu Pertama, pemerintah harus mengumumkan pasal sunset dari langkah-langkah dukungan ekonomi dan bisnis saat ini dan secara progresif mengadopsi strategi dukungan yang lebih terfokus untuk pemulihan. Pengaturan waktu dan kecepatan sangatlah penting. Menarik langkah-langkah dukungan ekonomi dan bisnis terlalu cepat dapat menyebabkan kegagalan besar-besaran pada perusahaan dan membuat persaingan semakin lemah, tetapi disisi lain dukungan ekonomi dan bisnis yang berkepanjangan dapat mengakibatkan distorsi, mengurangi insentif untuk beradaptasi dan berinovasi, dan memerangkap sumber daya dalam kegiatan yang tidak produktif.

Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa arus perusahaan yang keluar dan masuk dilakukan secara bertahap dilanjutkan dengan cara yang mendukung pemulihan inklusif (yaitu, tanpa lebih lanjut membebani mereka yang paling terkena dampak krisis, seperti pemuda, wanita dan migran). Ada peluang untuk meningkatkan status kepailitan, memfasilitasi penutupan bisnis tidak produktif dan restrukturisasi bisnis yang layak, dan meningkatkan kemampuan pengusaha untuk memulai bisnis baru setelah kegagalan. Karena kebangkrutan dapat meningkat secara dramatis, reformasi kebijakan harus dapat membatasi efek negatif dan mengurangi biaya pribadi bagi pengusaha gagal yang jujur.

Semua ini membutuhkan pengembangan kriteria untuk menilai UMKM mana yang harus mendapatkan dukungan selama pemulihan dan transisi ke model bisnis baru. Menerapkan kriteria tradisional untuk mengidentifikasi bisnis yang "layak" - seperti data neraca atau riwayat kredit baru-baru ini - mungkin tidak bekerja dengan efektif. Sebagai contoh, memanfaatkan perkembangan Fintech dan alat-alat digital untuk penilaian risiko kredit yang lebih efektif, pemberian layanan dan pemantauan

menyeluruh dapat membantu mengatasi keterbatasan pendekatan tradisional untuk pembiayaan bisnis pada saat ketidakpastian seperti saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejauh ini, pemerintah belum memanfaatkan instrumen ini secara efektif. Selain itu, instrumen pembiayaan non-utang harus digunakan lebih banyak untuk mengatasi lebih beragam kebutuhan dalam populasi UMKM dan memperkuat struktur modal mereka (mis. Ekuitas, pembiayaan mezzanine, leasing atau anjak piutang).

Ketiga, dukungan pemerintah harus menjangkau para pengusaha dan UMKM yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan masyarakat di era pasca-COVID. Awal yang inovatif, kewirausahaan dan model bisnis baru harus dipromosikan. Pada saat yang sama, UMKM tradisional yang sebagian besar menghilang dan perusahaan mikro yang berjuang untuk mengambil manfaat dari transisi digital harus mempercepat digitalisasi dan adopsi teknologi, perubahan organisasi dan peningkatan keterampilan. Keluar dari krisis, UMKM harus muncul dengan perlengkapan yang lebih baik secara digital dan dengan kemampuan tenaga kerja yang diperkuat. Hanya sedikit inisiatif kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang dari bisnis yang sudah mapan dan potensi pertumbuhan UMKM. Misalnya, Korea dan Irlandia telah bertindak untuk membantu bisnis kecil mengadopsi proses kerja baru, mempercepat digitalisasi dan menemukan pasar baru. Langkah-langkah dukungan struktural seperti itu, bersama-sama dengan persyaratan cerdas, harus dimasukkan dalam fase selanjutnya dari respons kebijakan.

Adapun dalam upaya menangani pandemi COVID-19, Tim Ahli Policy Brief Bidang Ekonomi di bawah naungan Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia (DISTP UI) merumuskan sebuah Policy Brief 7, Rekomendasi yang diberikan adalah agar pemerintah dapat membagi fokus penanganan pandemi COVID-19 dari sisi ekonomi menjadi dua periode utama, yaitu periode jangka pendek dan mendesak (emergency response: disaster relief process, lives first) dan periode jangka menengah (minimize recession).

Pada periode jangka pendek dan mendesak, pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa COVID-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak. Ada dua pihak yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni: pekerja atau rumah tangga dan perusahaan atau industri. Pemerintah juga direkomendasikan untuk memberikan perhatian khusus kepada industri yang memiliki kesulitan untuk membayar kredit/cicilan (credit constraint) khususnya UMKM dan industri yang terkena dampak paling besar dari tidak berjalannya perekonomian dalam beberapa waktu terakhir (kerajinan tangan, tekstil, restoran, hotel, industri hiburan, e-commerce, gig-economy). Pada sektor perbankan juga akan menghadapi masalah likuiditas (liquidity constraints) dan kredit macet (non performing loan). Bank Sentral bisa membeli surat utang pemerintah (government bonds) yang dapat menurunkan suku bunga. Di samping itu, likuiditas dari lembaga keuangan non-perbankan, terutama asuransi dan dana pensiun perlu juga mendapatkan perhatian. Pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi misalnya tekanan likuiditas dari sisi dana pensiun sebagai akibat dari penarikan JHT para pekerja yang mengalami PHK.

Sejumlah usulan kebijakan jangka menengah diantaranya, memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan menjadi kunci. Selanjutnya, menjaga kesinambungan sektor pangan, makanan dan minuman. Kemudian, pemerintah mampu memastikan terciptanya penguatan industri dalam negeri terutama industri alat kesehatan sebagai antisipasi merebaknya pandemi di masa yang akan datang. Jika kebijakan dari sisi penawaran telah diambil maka fokus kebijakan jangka menengah selanjutnya yang dapat diambil oleh pemerintah adalah upaya-upaya pemulihan agregate demand. Penghapusan pajak seperti PPN dan PPh setelah pandemi akan membantu mendorong permintaan (demand). Selain itu, pemerintah harus memberi stimulus kepada rumah tangga untuk mengonsumsi barang manufaktur, dan sektor jasa seperti restoran,

hotel dan pariwisata serta angkutan dan penerbangan.

Secara mikro melalui kebijakan perusahaan, dalam rangka menata kembali kondisi ekonomi UMKM yang melemah atau resesi akibat covid-19 ini diperlukan pengelolaan siklus bisnis secara Manajemen Business Cycle mengingat kondisi lingkungan bisnis sangatlah dinamis sehingga harus selalu dievaluasi dan diperbaiki siklus usahanya sehingga usaha bisa bertahan dan dapat terus berkembang dengan cara, yaitu (1) Menciptakan perubahan sebagai peluang untuk mencapai sukses, (2) Melihat perbedaan antar orang atau fenomena sebagai peluang bukan kesulitan, (3) Bereksperimen untuk mencari pembaharuan menuju pertumbuhan bisnis, (4) Menjadi pakar untuk usaha sendiri, (5) Menjadi pelayan untuk orang lain dan memiliki sifat rendah hati. Dengan kemampuan pengelolaan siklus bisnis tersebut, sebuah perusahaan pun harus dapat bertumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan memperhatikan faktor-faktor diantaranya 1. Strategic Intent (Kesatuan Visi dan Misi) 2. Decision Maker (Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Tepat), 3. Funding (Manajemen Keuangan Terencana), 4. Business Plan (Perencanaan Bisnis), 5. Manajemen Tim, 6. Execution, 7. Timing (Saat yang Tepat memulai usaha). Mengelola siklus bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi dan dengan perencanaan dan pengorganisasian harus memperhatikan siklus bisnis pada 4 periode yaitu 1. Puncak Siklus (Kemakmuran) 2. Resesi (Kemerosotan), 3. Palung (Depresi Paling Parah) 4. Pemulihan (Ekspansi) yang dapat menggambarkan klasifikasi jenis bisnis dengan bidang usaha atau peluang usaha pasca covid - 19,8 sehingga pelaku bisnis UMKM dapat mengidentifikasi jenis bisnis sesuai siklus bisnis yang dialami pada masa pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan yang sesuai dengan jenis bisnisnya.

Tabel 1. Data *business cycle* berdasarkan jenis bisnis pada lima bidang usaha sebagai basis peluang usaha.

Indikator Business Cycle	Jenis Bisnis					Keterangan Peluang Usaha
	Perdagangan	Industri	Jasa	Ekstraktif	Real Estate	
Kemakmuran	8	4	20	0	1	33 Peluang usaha yang bisa dikembangkan dan dipertahankan manajemennya
Resesi Ekonomi	3	2	2	1	0	8 Peluang usaha perlu ditingkatkan manajemennya
Palung (Depresi Parah)	5	2	6	0	1	14 Peluang usaha perlu pemulihan dan peningkatan manajemen
Pemulihan (Ekspansi)	3	2	1	0	0	6 Peluang usaha perlu dilakukan pemulihan / ekspansi dan ditingkatkan manajemen dengan maksimal

Beberapa pengusaha menilai bagaimana kebutuhan yang muncul terkait dengan krisis bisnis COVID-19 dapat memengaruhi bisnis mereka dan mengambil tindakan yang tepat, dengan mempertimbangkan juga beberapa aspek kompetitif seperti perencanaan skenario, analisis pemangku kepentingan, pengembangan strategi, komunikasi eksternal dan internal. Beberapa indikator dapat digunakan di perusahaan untuk mengevaluasi kapasitas reaktifnya dan memahami kemungkinan dampak perubahan digital untuk mengurangi efek negatif dari masalah krisis COVID-19. Setelah latar belakang teoretis jelas, dan begitu analisis status eksternal dan internal telah dilakukan, UKM harus merefleksikan model bisnis mereka sendiri. Transformasi digital tidak hanya berarti memperkenalkan teknologi baru untuk melakukan aktivitas yang ada: itu adalah proses mendesain ulang seluruh model bisnis.

Demi mendukung usaha pengusaha dalam mengimplementasikan model bisnis baru dan transformasi digital pada usaha mereka, penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan struktural untuk kepentingan jangka panjang. Kebijakan ini tidak saja digunakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 tapi juga era Industri 4.0 kedepannya. Kebijakan ini meliputi kebijakan-kebijakan jangka pendek bagi UMKM yakni pengenalan teknologi digital dan pelatihan bagi para pelaku dan pekerja UMKM serta kebijakan panjang bagi UMKM untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk proses produksi, penggunaan

media teknologi digital untuk mempromosikan produk UMKM, dan menemukan pasar potensial bagi produk yang dihasilkan. Dalam jangka pendek, perlu adanya pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan media e-commerce (belanja daring) untuk menjual produk-produk mereka. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 baru 3,79 juta UMKM (atau sekitar 8 persen) yang memanfaatkan platform online untuk memasarkan produknya.¹¹ Tentu situasi seperti ini dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk meningkatkan jumlah UMKM yang memanfaatkan platform online tadi. Kemudian, kebijakan jangka pendek tadi dilanjutkan dengan kebijakan jangka panjang. Pemerintah dapat memulainya dengan membuat peta jalan pengembangan UMKM dalam menghadapi era Industri 4.0 mulai dari pelatihan ulang (re-training) para pekerja UMKM guna beradaptasi dengan penggunaan teknologi produksi baru dan teknologi digital, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan program internet masuk desa, pelibatan dunia akademisi dan usaha besar dalam pendampingan pengenalan dan penggunaan teknologi produksi dan media digital, serta menghidupkan kembali program kemitraan usaha besar dan UMKM. Kebijakan struktural ini dilakukan untuk mendukung penguatan UMKM sekaligus mendukung pengembangan UMKM di era Industri 4.0.

Kebijakan yang mendukung harus mempertimbangkan perbedaan antar sektor agar lebih relevan dengan kebutuhan spesifik mereka; mereka juga harus lebih transparan jika mereka ingin memberikan subsidi secara langsung kepada pengusaha swasta, mereka bertujuan untuk membantu mengatasi krisis.⁹ Sementara itu, transformasi digital mengikuti munculnya keterampilan digital baru dan adopsi alat digital. Ini adalah proses transformasi yang membutuhkan penataan ulang model bisnis sebelumnya untuk memberi ruang bagi praktik baru, lebih efektif dan efisien.

D. PENUTUP

Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang mengalami

dampak perekonomian yang sangat besar. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terpuak dan terdampak dalam krisis ini, memperhatikan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDB, serapan tenaga kerja, ekspor dan investasi terhadap perekonomian Indonesia yang sangat besar dan signifikan, maka menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk membantu dalam memulihkan dan membangkitkan UMKM di Indonesia dengan berbagai bantuan dan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung bisnis UMKM. Kebijakan pemerintah tersebut dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek, menengah dan panjang, antara lain jangka pendek dan mendesak, pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa COVID-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak, untuk kebijakan jangka menengah diantaranya, memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan menjadi kunci, sedangkan strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era Industri 4.0.

Dengan masa pandemi COVID-19 yang tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya pandemi ini, maka UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen business cycle dengan memperhatikan kategori jenis bisnisnya pada 4 siklus bisnis, 1. Puncak Siklus (Kemakmuran) 2. Resesi (Kemerossotan), 3. Palung (Depresi Paling Parah) 4. Pemulihan (Ekspansi) yang dapat menggambarkan klasifikasi jenis bisnis dengan bidang usaha atau peluang usaha masa covid -19, dengan mengelola manajemen business cycle dengan baik dan perubahan bisnis model dan transformasi digital dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 ini maka diharapkan strategi perusahaan UMKM dapat berhasil mengatasi tantangan yang ada. Akhir kata, sinergi antara kebijakan makro pemerintah dengan kebijakan mikro perusahaan diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengatasi tantangan menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>

<https://money.kompas.com/read/2020/05/10/091500226/perekonomian-indonesia-pasca-pandemi-covid-19?page=all>

<https://www.oecd-forum.org/users/406151-lamia-kamal-chaoui/posts/rescuing-smes-from-the-covid-storm-what-s-next>

Data diolah dari data BPS dan Kemenkop tahun 2018

<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01379615/1785-koperasi-dan-163713-umkm-terdampak-pandemi-covid-19>

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-government-prepares-aid.html>

<https://www.ui.ac.id/ui-usul-kebijakan-ekonomi-di-saat-pandemi-covid-19-selamatkan-nyawa-minimalisasi-resesi/>

Asmini*, I Nyoman Utama, Wahyu Haryadi, Rosyda Rachman, “Manajemen business cycle sebagai basis peluang usaha pasca covid – 19: suatu strategi pemulihan ekonomi masyarakat”

Casalino, N and Żuchowski, I and Labrinos, N and Munoz N, Ángel L and Martín-J, José A. (2020). Digital Strategies and Organizational Performances of SMEs in the Age of Coronavirus: Balancing Digital Transformation with An Effective Business Resilience. Law and Economics Yearly Review Journal – LEYR

CASALINO, N., D’ATRI, A., BRACCINI, A.M. (2012), A quality management training system concerning ISO standards for sustainable organisational change in SMEs, in

International Journal of Productivity and Quality Management (IJPQM).

Arif Budiyo, “8 Juta UMKM.”

Aknolt Kristian Pakpahan, COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah